

NILAI-NILAI DEMOKRASI SEBAGAI DASAR PARTISIPATIF

Ayi Sobarna*

Abstrak

Konsep pembangunan yang partisipatif selayaknya sudah menjadi suatu kebutuhan bagi suatu daerah (desa, kota, kabupaten, provinsi, bahkan suatu negara). Karena, suatu pembangunan yang partisipatif pada dasarnya merupakan proses pembangunan yang berasal dari masyarakat, ditujukan untuk masyarakat, dan dilakukan oleh masyarakat, yang di dalamnya terjadi keterlibatan seluruh stakeholder dalam berbagai bentuk peranserta.

Sebagai dasar bagi terciptanya pembangunan yang partisipatif adalah adanya suatu pola kehidupan yang demokratis yang didukung oleh kondisi pranata sosial dengan profil kepribadian yang kondusif; sedangkan pola kehidupan yang demokratis hanya dapat terbentuk secara harmonis manakala antar pelaku pembangunan (seluruh stakeholder) dapat terbangun suatu pola silaturahmi.

Untuk dapat membangun suatu masyarakat yang partisipatif, diperlukan suatu rumusan mengenai kriteria/nilai-nilai dasar silaturahmi dan demokrasi dalam perspektif pembangunan yang partisipatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam silaturahmi adalah: (a) saling mengenal; (b) saling berlapang dada; (c) saling menolong; (d) saling menasehati; dan (e) persaudaraan; sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi dalam prospektif silaturahmi adalah (a) relasi kooperatif di atas relasi kompetitif; (b) kritik yang santun; (c) "positive thinking"; (d) "think win-win"; (e) "fair"; (f) "take and give"; dan (g) memiliki solidaritas sosial.

Kata Kunci : nilai-nilai silaturahmi, demokrasi, dan partisipasi.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan klasik tetapi tetap aktual tentang demokrasi adalah apakah demokrasi itu prosedur atau substansi. Sebagai prosedur, demokrasi merupakan mekanisme untuk memperoleh kekuasaan. Sedangkan sebagai substansi, demokrasi menghendaki terwujudnya kesejahteraan dan

* Ayi Sobarna, S.Ag., adalah dosen tetap Fakultas Tarbiyah Unisba
Nilai-Nilai Demokrasi Sebagai Dasar Partisipatif (Ayi Sobarna)

kedamaian bagi rakyat, sebab pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat (Sutrisno, 2000).

Dari persoalan tersebut, menyusul pertanyaan berikut, yaitu apakah mungkin kedamaian dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud tanpa demokrasi? Dalam menjawab pertanyaan ini, para analisis politik dan pejuang demokrasi menunjukkan ungkapan: “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* – kekuasaan cenderung pada kecurangan dan kekuasaan yang mutlak akan curang secara mutlak” (Madjid, 1992; Tirtosudiro, 1986). Ungkapan ini menyiratkan bahwa sistem demokrasi memang tidak secara otomatis mewujudkan kedamaian bagi rakyat. Namun, tanpa demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat kecil kemungkinan akan tercapai.¹ Demokrasi dapat memperbesar peluang terwujudnya kesejahteraan dan memperkecil penindasan. Dengan demikian, demokrasi tidak berwajah tunggal, ia merupakan suatu prosedur dan sekaligus substansi.

Memasuki melinium ketiga ini, demokrasi telah menjadi isu global. Negara-negara lain, termasuk Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur (pecahan Uni Soviet) dinilai telah mengalami kemajuan pesat dalam demokratisasi di segala aspek (Sirry, 2001). Akan tetapi, dengan mencermati kehidupan baik perpolitikan maupun dalam proses pembangunan di Indonesia akhir-akhir ini, dan diramalkan masih akan berlangsung sampai dua-tiga atau satu generasi ke depan, demokrasi di negara ini belum menunjukkan perkembangan yang *significant*². Memang para elit politik dan

¹ Dalam sejarah memang dikenal sistem monarki yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad saw, (abad VI M) Kaisar Anushirwan berhasil mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan rakyat Persia. Nama ini pernah disebut Al-Ghazali untuk menunjukkan contoh pemimpin yang adil. Pasca Khulafaur-Rasyidun juga terdapat khalifah monarki yang demikian, seperti Umar bin Abdul Aziz (memerintah 97-100 H/717-720 M) dari Dinasti Umawi dan Al-Qadir Billah Ahmad ibn al-Muqtadir (sekitar tahun 1000 M) dari Dinasti Abbasi (Lihat, Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta 1992, hal. 124). Pada zaman modern ini pun, ada sejumlah negara yang berbentuk monarki, tetapi dapat mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya, seperti Inggris, Belanda, dan Belgia. Akan tetapi contoh ini terlalu kecil sehingga tidak signifikan untuk memperlihatkan bahwa sistem demokratis tak diperlukan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

² Penilaian-penilaian tersebut, misalnya dari tajuk rencana berjudul *Ujian Sistem Bernegara (HU. Republika*, 5 Februari 2000); *Demokrasi Primitif (HU. Republika*, 10 Maret 2001); Resonansi berjudul *Demokrasi Bukan Kekerasan (HU.*

eksekutif di Indonesia telah lama bersepakat untuk melakukan sistem ini. Meski demikian, tampaknya demokrasi baru dipandang sebatas prosedur politik untuk memperoleh kekuasaan, tapi belum menyentuh substansi, yang secara sosial mewujudkan kesejahteraan dan secara psikologis menciptakan kedamaian publik.

Bicara demokrasi tidak akan terlepas dari makna kata *silaturahmi*. Silaturahmi merupakan inti ajaran Islam yang sudah akrab dalam *mind-set* masyarakat Indonesia yang mayoritas muslimin, dan melalui silaturahmi diharapkan dapat mempercepat proses demokrasi, sehingga selanjutnya dapat tercipta suatu masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan. Akan tetapi, karena demokrasi secara umum berasal dari Barat, sedangkan silaturahmi bersumber dari Islam, maka perlu penggalian mendalam mengenai norma-norma positif demokrasi dalam perspektif silaturahmi sendiri. Hal ini merupakan sebuah kemestian, mengingat tidak semua norma-norma demokrasi dapat diterapkan di semua tempat. Hasil penggalian ini dapat dimanfaatkan sebagai nilai-nilai demokrasi dan sebagai nilai-nilai dasar pembangunan yang partisipatif yang khas Indonesia dengan warna Islam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang ditelaah dalam penulisan karya ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pranata sosial yang diperlukan untuk menuntun kehidupan yang demokratis?
2. Bagaimana profil kepribadian yang diperlukan dalam menuntun kehidupan yang demokratis ?
3. Bagaimana prospek demokrasi di Indonesia ?
4. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam silaturahmi ?, dan
5. Nilai-nilai apa saja yang terkandung demokrasi dalam perspektif silaturahmi sehingga dapat dijadikan sebagai nilai-nilai dasar bagi pembangunan yang partisipatif ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui deskripsi tentang pranata sosial yang menuntun kehidupan demokrasi.

2. Mengetahui rincian tentang kepribadian yang diperlukan untuk memasuki kehidupan demokratis.
3. Mendapatkan gambaran tentang prospek demokratisasi di Indonesia.
4. Menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam silaturahmi.
5. Menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi dalam perspektif silaturahmi sebagai nilai-nilai dasar pembnagunan partisipatif.

1.4 Pembatasan Masalah

Pada awalnya, kata “demokrasi” berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. Namun dalam perkembangannya, kata ini juga merambah ke setiap aspek kehidupan, seperti pembagian, perusahaan, pendidikan dan keluarga. Dengan kompleksnya cakupan kata tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam tulisan ini, cakupan kata “demokrasi” dibatasi hanya pada level kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Di samping itu, ide tentang demokrasi berkaitan pula dengan aspek pembangunan politik, hukum, kultur, sosial dan psikologi. Aspek-aspek demokrasi yang ditelaah dalam tulisan ini dibatasi hanya pada aspek sosial dan psikologi.

1.5 Kegunaan

Karya tulis ini berdaya guna untuk mensosialisasikan gagasan demokrasi terutama di kalangan masyarakat muslim. Hal ini penting, sebab berdasarkan data dari *House of Freedom*, demokratisasi di negara-negara muslim terhitung lambat bila dibandingkan dengan negara-negara di Amerika Latin dan Eropa Timur. Seorang wartawan bernama Robin Wright bahkan sempat meragukan potensi seorang muslim berdemokrasi. Ia mempertanyakan. “*can a moslem be a democrat?*” (Sirry, 2001). Maka dengan sosialisasi demokrasi melalui terminologi khas Islam ini, diharapkan pertanyaan Wright tadi terjawab.

Bila daya guna tersebut tercapai, berarti telah terjalin relasi dialogis antara Barat dan Islam. Sebab, seperti diperkirakan Samuel P. Huntington dalam “*The Clash of Civilization*”, akan terjadi benturan antar peradaban antara Barat dan Islam (Majalah “*Ulumul Qur`an*”, 1993). Maka melalui telaah ini, pada urutannya benturan antar peradaban tidak terjadi.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Silaturahmi

Silaturahmi berasal dari kata *shila* (menghubungkan) dan *rahim* (kasih sayang). Kata “*rahim*” merupakan salah satu sifat Allah, yang dari kata sifat itu terbentuk pula kata rahmat. Oleh karena itu, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa silaturahmi berarti aktivitas menyambungkan kasih sayang dengan harapan mendapat rahmat Allah. Atau dengan kata lain, silaturahmi memadukan *hablum minallahi* dan *hablum minannas* (ikatan manusia dengan Allah).

Melakukan aktivitas silaturahmi berarti menjemput rahmat Allah. Hal ini merujuk pada beberapa hadits qudsi, yang antara lain berbunyi:

“Aku adalah *ar-Rahman*. Telah Kuciptakan ar-Rahim dan Kupetikkan baginya nama dari nama-Ku. Barangsiapa tidak bersilaturahmi, maka Aku akan memutuskan rahmat-Ku baginya. Dan barangsiapa mengkokohkan silaturahmi, maka Aku pun akan mengkokohkan rahmat-Ku baginya. Sesungguhnya rahmat-Ku mendahului kemurkaan-Ku” (Hadits Qudsi Riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Turmuzi, Ibnu Hibban, Hakim Baihaqi, yang bersumber dari Ibnu ‘Auf. Kharaiithi dan Khatib meriwayatkan hadits ini dari Abu7 Hurairah).

Redaksi yang agak berbeda dari redaksi di atas dapat dijumpai pada riwayat Hakim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas ra. (Usman dkk., 1987: 265-268).

Karena aktivitas silaturahmi menentukan terbuka atau tercerabutnya rahmat Allah, maka tindakan memutuskan silaturahmi diancam, seperti tersebut dalam hadits, “*Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan (silaturahmi) (H. Muttafaq ‘alaihi)*. Sementara itu menyambung silaturahmi memiliki hikmah yang besar sekali, seperti tergambar dalam hadits, “*Barangsiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaklah bersilaturahmi*” (HR. Turmuzi).

1.6.2 Demokrasi

Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Atau dalam ucapan Abraham Lincoln, “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Prayitno, 1999).

Demokrasi berangkat dari pengakuan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebebasan. Karena manusia bebas, maka ia bebas pula berpendapat dan menentukan hidupnya. Namun, justru karena kebebasan setiap manusia itu, maka terbuka kemungkinan pendapat dan kehendak yang beragam. Jika manusia melaksanakan kehendak masing-masing, maka akan terjadi adalah disharmoni. Dalam rangka menciptakan harmoni itulah, demokrasi menghendaki dialog dan kompromi, yang dapat mempersatukan berbagai pendapat dalam sebuah titik temu (Madjid, 2001).

Para filsuf berbeda pendapat tentang demokrasi ini. Namun demikian, dibandingkan dengan monarki dan oligarki, demokrasi masih lebih baik.

1.6.3 Partisipasi

Partisipasi secara harfiah dapat diartikan sebagai peran serta, “bergabung/urutan” bersama-sama dengan yang lain dalam suatu kegiatan, sedangkan FAO (Food and Agriculture Organization, 1989) mengemukakan bahwa terdapat banyak makna dari partisipasi, antara lain yaitu :

- (1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada suatu kegiatan (pembangunan jalan, misalnya) tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- (2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan pembangunan.
- (3) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang/kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- (3) Partisipasi adalah pemantapan dialog antar masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring (suatu proyek, misalnya) agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak – dampak sosial.
- (4) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat (pelaku kegiatan) dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- (5) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut Kruks S. 1983, ada dua alternatif utama dalam penggunaan partisipasi, yaitu : partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan partisipasi sebagai alat untuk mengembangkan diri. Logikanya, kedua interpretasi itu merupakan satu kesatuan, suatu rangkaian. Keduanya

mewakili partisipasi yang bersifat *transformasional* dan *instrumental* dalam suatu kegiatan tertentu, serta dapat kelihatan dalam kombinasi yang berbeda. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dengan demikian partisipasi adalah alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif seperti keadilan sosial, persamaan dan demokrasi.

Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan selain sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen pembangunan, dan juga sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Implikasinya adalah bahwa partisipasi juga menyangkut strategi manajemen, melalui mana negara dan atau daerah mencoba untuk memobilisasi berbagai sumberdayanya.

Secara filosofis, tingkat partisipasi masyarakat sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh sistem nilai atau budaya dan sikap-sikap pelaku (stake holder) pembangunan yang dominan di suatu daerah, apakah berlangsung secara demokratis, atau secara otoriter. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat tidak dapat secara mudah kita jelaskan, mengapa partisipasi suatu masyarakat relatif berhasil di suatu atau beberapa tempat (daerah), tetapi dapat juga menjadi sangat berbahaya di tempat lainnya. Semakin tinggi tingkat penyerahan kekuasaan ke tangan masyarakat adalah semakin baik, dan paling tidak pelibatan peranserta masyarakat dapat mencakup partisipasi dalam bentuk sosialisasi informasi, penentraman, kemitraan, pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan, dan fungsi kontrol. Ini semua hanya dapat berlangsung dengan harmonis manakala terbentuk suatu sistem nilai dan budaya, sistem bermasyarakat, dan bahkan sistem berpolitik – bernegara yang demokratis.

2 Pembahasan

2.1 Prospek Demokratisasi di Indonesia

Salah satu kecenderungan global, di samping demokratisasi di bidang pembangunan sosial dan ekonomi, juga demokratisasi di bidang politik. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi dikehendaki sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan penindasan (Luhulima, 2000). Sebagai sebuah jalan ide, demokrasi memerlukan proses realisasi. Para analis politik dapat dikatakan bersepakat bahwa demokratisasi di Indonesia berjalan sangat lambat, atau bahkan berjalan di tempat. Meskipun demikian, pendapat-pendapat mereka tentang proyeksi demokratisasi di Indonesia ini terfragmentasi kedalam beberapa penilaian sebagai berikut :

(1) Optimisme

Penilaian optimis terhadap demokratisasi di Indonesia antara lain dikemukakan oleh Rohman N. Lendong (HU. Kompas, 20 Juli 2001). Lendong melihat bahwa prospek demokratisasi di Indonesia akan cerah setelah menyaksikan bahwa militer tidak lagi memegang tampuk kekuasaan. Dengan mengutip pendapat Cornelis Lay, ia menulis bahwa naiknya kalangan militer pada masa lalu telah menyebabkan berkembangnya “kultur bandit” atau “kultur jagoan” dalam kehidupan sosial politik. Maka setelah reformasi, dengan melalui proses yang demokratis dan konstitusional, kalangan sipil naik ke puncak kekuasaan. Dan seiring dengan itu, delegitimasi doktrin dwifungsi TNI menjadi agenda reformasi.

Dalam pada itu, Lendong tidak berapriori bahwa dengan naiknya sipil ke puncak kekuasaan tidak secara otomatis demokrasi akan terwujud. Hanya secara implisit, ia berpikir bahwa demokrasi dengan penguasa sipil masih harus diperjuangkan. Tetapi demokrasi dengan penguasa dari kalangan militer hampir tidak mungkin. Meskipun demikian, membangun harmonisasi hubungan sipil-militer dalam rangka membidani demokrasi merupakan kebutuhan mendesak. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan dengan adanya pembagian peran yang spesifik antar keduanya.

(2) Pesimisme

Pesimisme demokratisasi di Indonesia dan di negara-negara muslim lainnya dimotori oleh Robin Wright dengan pertanyaan retorisnya, “*Can a moslem be democrat?*” (Sirry, 2001). Menurut Sirry yang mengutip data indeks kebebasan dari *House of Freedom*, memang fenomena demokrasi atau semidemokrasi di negara-negara dunia ketiga umumnya mengalami kenaikan, kecuali di negara-negara muslim. Negara-negara muslim di dunia (seluruhnya berjumlah 48 negara) dinilai gagal membangun politik demokrasi. Sementara negara-negara non-muslim di Asia, Afrika, Amerika Latin dan pecahan Uni Soviet, serta Eropa Timur umumnya bergerak cepat menjadi demokratis. Demikian data dari *Freedom House*.

Nada pesimisme demokratisasi di negara-negara muslim ini sedikitnya ditopang oleh tiga tesis, yang juga dikutip Sirry dalam artikelnya berjudul “*Demokrasi tanpa Demokrat*” itu. Tesis pertama dikemukakan oleh Elie Kedourie. Ia menilai bahwa demokratisasi di negara-negara muslim lambat karena pemahaman doktrinal yang menghambat praktek demokrasi. Gagasan demokrasi, menurutnya, masih asing dalam *mind-set* Islam. Hal ini disebabkan karena muslim cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

Teori kedua kemukakan oleh Bernard Lewis yang berpendapat bahwa lambatnya demokrasi di negara-negara muslim karena persoalan kultur. Demokratisasi di negara-negara muslim pada masa mendatang tidak akan sukses sebab mereka sudah terbiasa dengan kultur otokrasi dan kepatuhan pasif.

(3) Semi-pesimisme

Nada semi-pesimisme demokratisasi di Indonesia dikemukakan oleh pengamat politik Kastorius Sinaga (HU. Kompas, 6 Agustus 2001). Ia meramalkan akan munculnya era baru yang disebut *soft authorianism* (era otoriter halus). Ia meramalkan kemunculan era berdasarkan fakta bahwa duet Megawati -- Hamzah Haz kembali mengutamakan stabilitas politik, mengedepankan rekonsiliasi semu sebagai strategi untuk mengakhiri pertikaian khususnya di tingkat elit, serta revivalisme lembaga-lembaga penopang stabilitas negara, seperti rencana membuka kembali departemen penerangan, meskipun kemudian dibatalkan untuk sementara.

Dalam tesis Sinaga, bila era *soft authorianism* ini benar-benar muncul, maka militer akan mendapat ruang yang lebih strategis, baik dalam pemerintahan maupun dalam politik. Bila ini terjadi maka peta hubungan eksekutif dengan militer menjadi dekat. Pada satu sisi, langkah ini memang mau tak mau harus diambil eksekutif dalam rangka memadamkan berbagai konflik horizontal, sparatisme dan terorisme. Akan tetapi di sisi lain, peta hubungan seperti ini akan menjauhkan eksekutif dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang menurut Sinaga, memiliki jaringan kuat berakar sampai ke tingkat internasional. Sinaga kemudian mengingatkan bahwa LSM sekarang sudah menjadi sebuah *new social movement*, yang merupakan sumberdaya politik jangka panjang, khususnya bagi konsolidasi demokrasi.

2.2 Pranata Sosial yang menuntun Demokrasi

Dalam sejarah manapun, demokrasi memerlukan proses yang panjang. Namun demikian, di sebagian negara demokratisasi berlangsung relatif cepat sedangkan di negara lain berlangsung lambat. Para analis politik mencari jawaban perbedaan kecepatan tersebut antara lain pada dimensi sosial psikologis. Faktor-faktor yang termasuk bidang sosial adalah:

(1) Kesejahteraan Umum

Seymor Marthin Lipset mengemukakan teori tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dengan proses demokratisasi. Menurutnya, "*The higher the level of economic development, the better the prospect of Nilai-Nilai Demokrasi Sebagai Dasar Partisipatif* (Ayi Sobarna)

democratization – semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, prospek demokratisasi semakin baik” (Nurjaman, 2001). Pemikir lain yang pendapatnya seperti ini antara lain adalah Francis Fukuyama. Meskipun masih *debetable*, teori ini bila dipertimbangkan oleh para elite politik yang sedang berkonflik, jelas merupakan sebuah kearifan bahkan keniscayaan.

Di tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, gagasan demokratisasi tak jarang menghasilkan sinisme. Bahkan lebih dari itu, meningkatnya pengangguran, baik karena belum mendapat kesempatan kerja ataupun karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kerap kali dimanfaatkan dalam bentuk demonstrasi dengan dalih demokrasi³

Di antara tesis-tesis tentang penyebab kemiskinan di berbagai negara,⁴ di Indonesia tesis kemiskinan struktural tampaknya lebih mendekati kenyataan. Kebijakan konglomerasi dengan harapan ada “efek menetes ke bawah” pada masa lalu, yang menyebabkan parahnya krisis ekonomi, merupakan bukti kebenaran tesis itu.

Kemiskinan di Indonesia bukan disebabkan karena minimnya sumber daya, melainkan karena ketidakadilan ekonomi yang merupakan salah satu bentuk ketidakadilan sosial. Ketidakadilan ekonomi telah lama menimbulkan kesenjangan. Para pejabat negara yang sudah mendapat gaji dan tunjangan yang besar, ditambah fasilitas yang lebih dari cukup, tak jarang turut terjun juga ke dunia bisnis. Berbagai peraturan yang melarang para pejabat berbisnis memang telah lama dikeluarkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1974, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 10 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (Majalah “Tempo” Edisi 1-7 Oktober 2001).

³ H.U. Republika Edisi 25 Juni 2000, misalnya, memberitakan sebuah “agen” yang menyediakan masa sekitar 5.000 orang. Dalam waktu kurang dari lima jam, masa tersebut siap hadir untuk berdemo di tempat tertentu dengan tuntutan tertentu sesuai pesanan

⁴ Setidaknya ada dua tesis kemiskinan yang berkembang di kalangan ilmuwan sosial: tesis budaya kemiskinan dan kemiskinan struktural. Pendukung tesis budaya kemiskinan berpendapat bahwa orang hidup dalam kemiskinan karena budaya, pandangan hidup yang fatalis “*nrimo*, tak mau berusaha, dan sebagainya. Sedangkan pendukung tesis kemiskinan struktural melihat bahwa orang hidup miskin bukan karena tak mau berusaha melainkan karena dibuat oleh sistem (Lihat, Rakhmat, Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus, Mizan, Bandung, 1992).”

Akan tetapi selalu saja ada celah dalam peraturan-peraturan itu untuk diterobos. Maka praktek kolusi tak terhindarkan lagi. Dan akhirnya upaya untuk memajukan kesejahteraan umum (Alinea IV Pembukaan UUD '45) tidak dapat diandalkan hanya pada seperangkat aturan, tetapi juga moralitas, dalam hal ini budaya malu. Tanpa dibarengi upaya serius dalam mengatasi kemiskinan, upaya demokratisasi akan sia-sia.

(2) Keterbukaan Akses Informasi

Sejajar dengan pentingnya memajukan kesejahteraan umum, demokratisasi juga memerlukan keterbukaan akses informasi. Hal ini disebabkan karena demokrasi akan tumbuh di tengah masyarakat yang berpendidikan (*well educated*) dan melek informasi (*well informed*). Akses mereka pada informasi seluas-luasnya memungkinkan mereka berperan secara maksimal pada kehidupan masyarakat mereka (Prayitno, 1999).

Salah satu perbedaan antara negara demokratis dan negara otoriter adalah dalam menyikapi arus informasi. Di negara otoriter informasi didikte dan diawasi. Sedangkan di negara demokratis tidak demikian.

Keterbukaan terhadap akses informasi memang beresiko munculnya kekhawatiran akan beredarnya berita-berita yang merugikan pihak-pihak tertentu, terutama pemerintah. Pada masa lalu tidak sedikit penerbitan yang dibredel atau dibekukan karena dianggap menyudutkan pemerintah. Tindakan menyudutkan pemerintah selanjutnya dianggap ancaman bagi negara dan merupakan tindakan tak bertanggung jawab, karena itu pasal yang dikenakan pada media yang bersangkutan adalah "*Hart zei artikelen*".

Dengan pengenaan pasal tersebut, praktis demokratisasi tersumbat karena massa diliputi perasaan takut. Semestinya, kekhawatiran tersebut tidak perlu ada bila disepakati bahwa tanggung jawab pers adalah kepada hukum dan bukan kepada pemerintah (Lubis, 1993). Di samping itu, Belanda, negeri yang merupakan rujukan positif, pasal "*Hart zei artikelen*" sudah lama dihapus, Nasution, 1993).

2.3 Profil Pribadi Demokratis

Menurut Carol C. Gould (Effendi, 2001), sedikitnya ada lima ciri kepribadian demokratis: tanggung jawab, toleran, adanya kesadaran *resiprositas*, *open-mindedness* (keterbukaan pemikiran), dan sportif.

(1) Tanggung jawab

Konsep tanggung jawab dalam psikologi lahir dari filsafat, terutama *Eksistensialisme*. Dalam filsafat eksistensialisme, tanggung jawab merupakan sikap yang harus mengiringi kebebasan manusia. Dengan tanggung jawab, manusia dituntut untuk membuat putusan-putusan atau memilih tindakan-tindakan tertentu untuk membentuk keberadaan dirinya (Engkoswara, 1987).

Dalam Kamus Filsafat (Liputo, 1995), tanggung jawab (*responsibility*) disebut sebagai konsep yang didasarkan pada kewajiban. Implikasinya, pengabaian terhadap tanggung jawab dapat dikenai hukuman, sedangkan pelaksanaannya pantas mendapat penghargaan (kehormatan atau pujian). Lebih lanjut, konsep tanggung jawab berhubungan dengan *answerability*, *accountability*, dan *self-control*.

(2) Toleran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1992), toleransi adalah sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kelakuan, dsb.), yang berbeda dengan pendirian sendiri.

Toleransi pada dasarnya adalah rasa saling menghargai perbedaan dan membiarkan keagamaan sebagai sifat alamiah. Toleransi juga merupakan implikasi dari kebebasan manusia dalam tataran sosial. Toleransi merupakan konsekuensi dari realitas masyarakat yang bertujuan membentuk dinamika sosial yang harmonis (Burhanuddin, 2001).

(3) Adanya Kesadaran Resiprositas

Konsep kesadaran resiprositas dapat dirujuk pada konsep relasi Aku-Kamu (*the I-Thou Relationship*) yang diperkenalkan Martin Buber (Engkoswara, 1987). Dalam relasi ini, individu sadar dan menghargai *partner*-nya sebagai subjek, sebagaimana dirinya. Lawan dari konsep ini adalah *I-it relationship*, yang memandang orang lain sebagai objek, yang bisa diabaikan bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Dalam konsep *I-Thou relationship*, terbuka kemungkinan individu memiliki rasa empati dan memberikannya kepada *partner*. Pada gilirannya, empati ini dapat menjadikan individu sanggup mencoba membayangkan apa dan bagaimana dunia yang nampak dari perspektif *partner*.

(4) *Open-mindedness*

Open-mindedness (keterbukaan pemikiran) pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kesadaran akan relativitas pengetahuan manusia. Dengan sikap ini, seseorang tidak mengklaim pendapatnya sebagai satu-satunya kebenaran. Secara psikologis, *open-mindedness* lahir dari konsep diri (*self-concept*) positif (Rakhmat, 1992), yang cirinya antara lain selalu terbuka, terhadap kritik sekalipun. Kritik dipandang sebagai *input* untuk mematangkan kepribadian, dan bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, *open-mindedness* membuka jalan menuju persaingan dalam membuat prestasi.

(5) Sportif

Konsep sportif dapat dilacak pada pemikiran Thomas Aquinas ketika ia menguraikan tentang watak atau karakter yang baik (Mohamad, 2001). Sportif merupakan bagian dari sikap *gentleness*, yang dengan sikap ini individu dapat mengakui kemenangan dan keunggulan sekalipun berbeda pada pihak lawan. Dan pada saat yang sama, ia dapat mengakui kelemahan dan kekalahan sekalipun pada pihak sendiri. Dalam bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa *Sanskrit*, sportif berarti ksatria. Dalam bahasa Jawa, ciri orang ksatria antara lain “*menang tanpa mengasorake*”.

2.4 Nilai-nilai yang Terkandung dalam Silaturahmi

Menurut Ilyas Ruchiyat, ada dua hikmah yang terkandung dalam silaturahmi: *ta'aruf* dan *taalluf* (Ruchiyat, 1994). Sementara itu, A. Abdul Hakim dan J. Mubarak, menambahkan tiga hikmah: *ta'awun*, *taushiyah* dan *ukhuwah* (Hakim dan Mubarak, 2000). Dengan demikian, ada nilai-nilai yang dapat diuraikan di sini sebagai berikut.

(1) *Ta'aruf*

Kata *ta'aruf* berasal dari kata '*arafa*' yang berarti mengenal. Dalam tata bahasa Arab, *ta'aruf* merupakan bentuk kata *musyarakah* (aktivitas yang dilakukan secara timbal-balik). Oleh karena itu, *ta'aruf* berarti saling mengenal. Al-Qur`an secara jelas menunjukkan pentingnya *ta'aruf*, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Dari kedua jenis ini kemudian berkembang keturunan yang banyak. Maka muncullah suku-suku dan bangsa-bangsa yang beraneka ragam (QS. 49:13).

Menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya, keberagaman manusia juga terlihat dalam aspek ekonomi dan warna kulit. Selain itu, tentu saja manusia

berbeda dalam pemikiran. Sebuah peribahasa berbunyi: “*Kepala sama berbulu pendapat berlainan*”. Kenyataan ini mengharuskan manusia saling mengenal pemikiran masing-masing. Karena dari penciptaan, manusia berasal dari Allah SWT. dan secara teoritis suasana saling mengenal membuahkan suasana tenggang rasa dalam mengatasi berbagai perbedaan itu.

(2) *Taalluf*

Secara sederhana, *taalluf* berarti hubungan yang didasari oleh perasaan kelembutan. Pola hubungan *taalluf* ini merupakan hasil awal dari *ta'aruf*. Tanpa ada suasana saling mengenal, orang cenderung bertindak agresif. Penelitian yang dilakukan Zimbardo dapat dijadikan rujukan bagaimana hubungan antara situasi *anonim* dengan *agresivitas*. Ia menemukan bahwa dalam suasana anonim, sifat agresif kerap kali muncul (Rakhmat, 1992). Oleh karena itu, silaturahmi yang mengandung hikmah *ta'aruf*, pada gilirannya akan menurunkan agresivitas.

(3) *Ta'awun*

Ta'awun berasal dari kata ‘*awana*’ (menolong). Jadi *ta'awun* berarti sikap saling menolong. Sikap ini lahir dari hati yang lembut dan penuh kesetiaan. Sifat ini harus ada pada diri manusia, karena secara alamiah, manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, tak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Sikap *ta'awun* merupakan pintu, sehingga orang-orang yang berbeda itu melakukan kerja sama. Dalam suasana kerja sama itulah, kelemahan seseorang dapat tertutupi oleh kelebihan orang lain.

(4) *Taushiyah*

Taushiyah berarti saling berwasiat. Seperti halnya *ta'awun*, yang lahir karena setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, demikian pula halnya *taushiyah*. Manusia tidak selamanya berada dalam kondisi kontrol penuh terhadap dirinya. Ada saat-saat ketika manusia alfa dan lepas kontrol. Di saat itulah, *wasiat* diperlukan agar kembali dalam kondisi sadar, sehingga dapat memperbaiki diri.

Namun demikian, *taushiyah* tak akan terjadi manakala masing-masing berbeda dalam tabir individualitas. *Taushiyah* hanya akan lahir bila masing-masing pihak berbeda dalam kerangka pikir “satu diri”. Kerangka pikir “satu diri” berimplikasi munculnya perasaan bahwa orang lain adalah bagian dari tubuhnya juga. Sehingga kecelakaan orang lain akan dianggap sebagai musibahnya juga. Dari perspektif seperti inilah, dapat dipahami sabda Nabi

Muhammad saw., “*Tolonglah saudaramu, baik ketika berbuat dzalim ataupun sedang didzalimi*” (Al-Hadits).

(5) Ukhuwah

Hasil lebih lanjut dari silaturahmi adalah *ukhuwah*. *Ukhuwah* berarti persaudaraan. Asalnya, kata ini dimaksud sebagai pola hubungan antar anggota yang memiliki hubungan darah. Kemudian, penggunaan kata ini berkembang pada ikatan-ikatan lain seperti wilayah, agama, dan ideologi. Dari latar seperti ini, dapat dikatakan bahwa istilah saudara, seagama, dan lain-lain, mengandung dorongan kesadaran bahwa semuanya ada keterikatan seakan-akan keluarga yang dihubungkan darah.

2.5 Nilai-nilai Demokrasi dalam Perspektif Silaturahmi

Bagian ini akan menganalisis dimensi sosial-psikologis demokrasi dalam perspektif silaturahmi. Perspektif silaturahmi terhadap dimensi sosial-psikologis ini menghasilkan nilai-nilai baru, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Relasi kooperatif di atas relasi kompetitif

Arena politik hanya merupakan arena perebutan kekuasaan. Demikianlah politik *as usual*. Kenyataan ini sebenarnya merupakan produk dari pandangan yang sempit tentang politik, sekalipun dalam sistem demokrasi. Sebab tujuan akhir politik itu sendiri, seperti kata Aristoteles (Liputo, 1995), sama dengan etika dan sama dengan tujuan manusia secara umum, yaitu tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kompetisi sesungguhnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah sistem demokrasi. Tetapi, demokrasi juga menghendaki kepribadian yang toleran, sadar akan resiprositas, dan harus berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam perspektif silaturahmi, terutama nilai *ta'awun*, ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kompetisi perlu memiliki visi kerja sama (kooperatif) sebagai bukti tanggung jawab terhadap rakyat. Dengan visi kooperatif, perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak bukan menjadi sumber kerawanan sosial, melainkan menjadi sumber energi untuk menjadikan sebuah negara bernilai lebih.

(2) Kritik yang santun

Salah satu mitos yang berkembang di negara otoriter adalah “*the king can do no wrong* – raja tak dapat berbuat salah”. Sebaliknya, di negara demokratis, diakui bahwa setiap orang sangat mungkin melakukan *Nilai-Nilai Demokrasi Sebagai Dasar Partisipatif (Ayi Sobarna)*

kesalahan. Oleh karena itu, kritik di dalam negara demokratis mendapat porsi tersendiri. Secara psikologis, kritik merupakan implikasi dari keterbukaan pemikiran dan tanggung jawab publik terhadap keberadaan negara. Sementara secara sosial, kritik merupakan konsekuensi dari keterbukaan akses informasi.

Namun demikian, tidak semua kritik dapat mengubah perilaku dan kebijakan yang menyimpang. Mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan negara adalah manusia juga. Sebagai manusia biasa, mereka mempunyai perasaan. Oleh karena itu, kritik perlu disampaikan secara santun. Santun di sini dapat berarti ketepatan waktu, tempat, dan cara. Dari sini dapat dipahami mengapa Allah SWT mengingatkan Nabi Musa as dan Nabi Harun as agar dalam berhadapan dengan Fira'un, keduanya berkata dengan lembut atau *qawlan layyina* (QS. 20:44). Sementara itu, kepada Nabi Muhammad saw Allah memberi petunjuk bahwa bila Nabi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingnya (QS. 3:159). Kritik yang santun kerap menumbuhkan simpati. Kritik yang kasar menimbulkan antipati.

(3) Positif thinking (khusnudzan)

Berpikir adalah upaya memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Secara singkat, berpikir adalah proses penarikan kesimpulan (Rakhmat, 1992). Pada umumnya, kegiatan berpikir hanya menggunakan rasio, seperti dalam berpikir induktif, deduktif, evaluatif, dan berpikir analogis. Akan tetapi, ada saat-saat tertentu ketika orang berpikir dengan melibatkan perasaan secara dominan. Dari sinilah dikenal istilah berpikir positif (*positive thinking*) dan berpikir negatif (*negative thinking*).

Sebagai dampak dari suasana kompetitif dalam politik, satu hal yang logis bila muncul kecurigaan, prasangka dan sebagainya kepada lawan politik. Perasaan seperti ini pada gilirannya akan berakumulasi dalam pola pikir negatif. Para psikolog seringkali mengingatkan bahwa pola pikir negatif lebih sering kontraproduktif daripada produktif.

Namun berdemokrasi bukanlah berpolitik tanpa perasaan nurani. Dimensi sosial psikologis demokrasi adalah keterbukaan terhadap akses informasi dan *open-mindedness* (keterbukaan pemikiran). Sementara itu, dalam silaturahmi terdapat nilai ta'aruf, taalluf dan ukhuwwah. Oleh karena itu, berdemokrasi perlu menggunakan pola berpikir positif. "*Positive thinking leads to positive action*", demikian tulis Susan Curtis (1988). Berpikir positif membimbing aksi yang positif. Dan hanya dari aksi yang positif, kedamaian dan kesejahteraan dapat diharapkan.

(4) Think Win-Win

Bila berpolitik hanya dianggap sebagai kompetisi, maka falsafah yang berlakunya adalah *win/lose* (kalah/menang). Dalam falsafah ini, satu pihak berusaha mengalahkan pihak lain, karena pihak lain adalah musuh. Misi falsafah *win/lose* adalah berusaha memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menguras habis energi lawan. Kehidupan dilihat sebagai pertarungan tiada habis-habisnya untuk menghasilkan orang yang paling kuat. Dan apabila terjun ke dunia politik, berarti menjadi *zoon politicon*, yang memangsa siapa saja dengan cara apa saja untuk memenangkan dirinya (Rakhmat, 1998)

Bila praktek seperti ini yang telah terjadi, berarti telah terjadi *primitifisasi* atau *dehumanisasi* manusia. Pada bagi terdahulu, telah disebutkan bahwa demokrasi memiliki dimensi psikologis antara lain munculnya kesadaran akan resiprositas (timbal-balik). Kesadaran ini mendorong pemahaman bahwa apabila satu pihak menganggap orang lain sebagai musuh, pihak lain pun demikian. Bila satu pihak berusaha mengalahkan pihak lain sebagai kawan, maka pihak lain pun demikian.

Dengan perspektif silaturahmi (*ta'aruf* dan *taalluf*), ini berarti bahwa kedua belah pihak perlu berfalsafah *win/win*. *Win/win* adalah kerangka pikir dengan hati yang selalu berusaha memperoleh keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. Falsafah ini berarti kesepakatan atau penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan *win/win*, semua pihak merasa enak dengan keputusan dan merasa terlibat dalam rencana (Rakhmat, 1998).

(5) Fair (adil)

Loyalitas kepada partai atau kepada eksekutif yang berasal dari partainya merupakan hal wajar dalam politik. Tetapi loyalitas hendaknya tidak menghilangkan sikap kritis. Fenomena yang muncul dalam perpolitikan Indonesia sejak zaman Orde Baru adalah loyalitas tanpa sikap kritis. Sehingga, seperti kata peribahasa, "*Kumbang mati di seberang lautan tampak; Gajah mati di pelupuk mata tak tampak*". Golkar yang terus-menerus mempertahankan Soeharto (1967-1998) dan Habibie (1998-1999); dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mati-matian mendukung Abdurrahman Wahid (1999-2001), merupakan bukti fenomena tersebut.

Berdemokrasi yang santun adalah berpolitik dengan menunjukkan sikap sportif atau ksatria. Masing-masing harus menunjukkan pengakuan terhadap suatu keunggulan, sekalipun keunggulan itu berada pada pihak

lawan. Dan ia pun berani mengkritik sebuah penyimpangan sekalipun dilakukan oleh partai sendiri.

Dalam perspektif silaturahmi (*ta'aruf, taalluf, taushiyah, dan ukuhuwah*), sikap sportif berarti adil (*fair*). Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "*Apabila kalian berkata, maka bersikap adillah, sekalipun kepada kaum kerabat*" (QS. 6:152). Secara sepintas, kritik terhadap partai sendiri atau eksekutif yang berasal dari partai sendiri, terkesan menunjukkan ketidakompakan di tubuh partai. Tetapi, bila direnungkan lebih mendalam, hal ini akan menambah simpati publik, dan ini berarti tabungan politik demi eksistensi partai di masa depan.

(6) Take and give

Pada bagian lalu telah dikemukakan bahwa salah satu ciri negara otoriter adalah dalam hal kritik. Di negara otoriter, kritik dilarang sedangkan di negara demokrasi tidak demikian. Kritik selanjutnya dibagi dua: konstruktif dan destruktif.

Namun demikian, kritik konstruktif, yang disampaikan secara santun seringkali tidak dapat membuahkan hasil berupa perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik, manakala pihak yang dikritik tidak mau menerimanya. Begitu banyak orang atau kelompok yang dengan cermat mengkritik kelompok lain. Tetapi hanya sedikit pihak yang sanggup menerima kritik orang lain dengan lapang dada.

Demokrasi menghendaki agar masing-masing pihak berani melontarkan kritik yang merupakan wujud tanggung jawab dan keterbukaan pemikiran. Dalam perspektif silaturahmi, terdapat nilai *taushiyah*, yang berarti bahwa nasihat-menasehati harus dilakukan secara musyawarah atau timbal-balik. Di sinilah letak pentingnya memiliki kesadaran *take and give*.

(7) Solidaritas

Secara sosiologis, menduduki jabatan publik, baik sebagai eksekutif, legeslatif, maupun menduduki jabatan lainnya merupakan suatu posisi yang terhormat. Di samping itu, secara ekonomis, posisi tersebut menjanjikan secara finansial. Namun demikian, tidak jarang, kekayaan para pejabat ini melimpah secara tidak wajar. Ketidakwajaran ini tak jarang di samping menimbulkan kecemburuan sosial, juga secara psikologis menyebabkan ketidakwibawaan penyelenggara negara di "mata" publik. Itulah sebabnya, akuntabilitas publik penyelenggara negara perlu diperhitungkan.

Memang tidak tertutup kemungkinan, kekayaan itu diperolehnya dengan cara yang benar secara hukum. Akan tetapi, dalam rangka

memelihara akuntabilitas publik, kekayaan para pejabat perlu didaftar baik jumlah maupun sumbernya. Hal ini penting untuk menghindari kecurigaan. Pendaftaran kekayaan tentu bukan dimaksud untuk berunjuk kekayaan. Dari perspektif silaturahmi, pendaftaran kekayaan para penyelenggara negara merupakan “*ta’aruf*”, sehingga antara pejabat dengan publik dapat saling mengetahui kondisi ekonomi masing-masing. Namun pendaftaran saja tidak cukup, jika tidak dilanjutkan dengan munculnya rasa solidaritas dari pihak yang ekonominya berkecukupan.

Oleh karena itu, di tengah lebih dari 40 juta jiwa rakyat Indonesia yang hidup melarat, dengan daftar tersebut, para penyelenggara negara seharusnya berpikir ulang untuk terus menumpuk kekayaan pribadi. Sebab dengan akses informasi yang demikian terbuka, pada gilirannya publik akan melihat penumpukan kekayaan yang tak wajar itu dengan antipati. Bila suasana seperti ini telah dan terus terjadi, publik tidak percaya lagi kepada penyelenggara negara dan aspirasi mereka segera disalurkan melalui ekstra parlementer.

2.5 Nilai-nilai Silaturahmi, Demokrasi, dan Partisipasi Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan (bernegara, berpolitik, bersosialisasi, berekonomi, dsb.) dalam pembangunan baik dirinya, lingkungannya, maupun negaranya sangat tergantung pada tatanan/sistem nilai sosial, nilai budaya, dan sikap-sikap pelakunya yang dominan di suatu daerah, apakah nilai-nilai budaya tersebut berlangsung secara demokratis, atau secara otoriter.

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa bicara demokrasi dalam rangka terwujudnya proses partisipasi, tidak akan terlepas dari perlu adanya proses *silaturahmi*. Untuk Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, silaturahmi telah menjadi *mind-set* masyarakat Indonesia. Dan melalui proses silaturahmi ini diharapkan proses demokrasi dapat terjadi secara cepat, sehingga selanjutnya dapat tercipta suatu masyarakat yang partisipatif dalam berbagai baik dalam proses bernegara maupun dalam proses pembangunan.

Apabila disimak dari proses penggalian mendalam mengenai norma-norma positif demokrasi dalam perspektif silaturahmi sebagaimana diuraikan pada butir 2.1 sampai dengan 2.5 di atas, maka nampak terdapat nilai-nilai silaturahmi dan nilai-nilai demokrasi yang dapat dijadikan sebagai dasar (prakondisi) bagi terciptanya proses partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, terutama dalam hal yang berkaitan dengan proses pembangunan dan proses bernegara.

Dengan demikian, berjalannya proses silaturahmi antar berbagai komponen pembangunan negara dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, diharapkan dapat menjembatani terbentuknya proses demokrasi. Dan terciptanya masyarakat demokratis dengan segala nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam perspektif silaturahmi, juga diharapkan dapat tercipta suatu pola hidup dan kehidupan baik dalam bernegara, maupun dalam setiap aspek pembangunan yang betul-betul partisipatif. Karena, partisipasi dapat dijadikan sebagai alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan dan bernegara yang normatif seperti keadilan sosial, persamaan hak dan kewajiban, dan juga keadilan dalam demokrasi.

3 Penutup

3.1 Kesimpulan

Dari uraian terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pranata sosial yang diperlukan untuk menuntun demokratisasi adalah kesejahteraan umum dan keterbukaan terhadap akses informasi. Wacana tentang demokrasi tanpa didukung oleh kesejahteraan umum seringkali menghasilkan sinisme. Sedangkan akses informasi menjadi niscaya dalam demokratisasi karena demokrasi hanya akan tumbuh dalam masyarakat yang *well educated* (terdidik) dan *well informed* (melek informasi).
2. Profil pribadi yang diperlukan dalam demokratisasi adalah: a. tanggung jawab; b. toleran; c. memiliki kesadaran resiprositas; d. *open mindedness* (keterbukaan), dan; e. *sportif*.
3. Terdapat gambaran yang berbeda tentang prospek demokratisasi di Indonesia: Pendapat *pertama*, melihat prospek demokratisasi di Indonesia dengan rasa optimis dengan naiknya kalangan sipil ke puncak kekuasaan. Pendapat *kedua*, melihat prospek demokratisasi di Indonesia dengan rasa pesimis, karena secara umum masyarakat muslim sulit untuk menerapkan demokrasi. Sedangkan pendapat *ketiga*, melihatnya dengan semi pesimis, karena meskipun kalangan sipil yang naik ke kursi eksekutif, tetapi eksekutif ini dinilai terlalu dekat dengan militer yang mengakibatkan menjauhnya kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Nilai-nilai yang terkandung dalam silaturahmi adalah: a. *ta'aruf* (saling mengenal); b. *taalluf* (saling berlapang dada); c. *ta'awun* (saling menolong); d. *taushiyah* (saling menasehati), dan; e. *ukhuwwah* (persaudaraan).

5. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi dalam perspektif silaturahmi adalah sebagai berikut: a. relasi kooperatif di atas relasi kompetitif (berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan adalah hal yang wajar, tetapi di atas kepentingan itu harus dibangun kerja sama untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian rakyat); b. kritik yang santun (para politisi hendaknya memilih statement yang membuat publik sejuk dan tidak membuat panas suasana); c. *positive thinking* (husnudhan); d. *think win-win* (berpikir menang-menang); e. *fair* (adil); f. *take and give* (dengan perspektif silaturahmi, masing-masing pihak hendaknya saling memberi dan menerima nasihat), dan; g. memiliki solidaritas sosial.
6. Proses partisipatif dapat terwujud melalui berjalannya proses silaturahmi dan proses demokrasi dengan segala aspek nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

3.2 Rekomendasi

1. Pesimisme terhadap demokrasi di Indonesia beranggapan bahwa demokratisasi di negara muslim terhambat karena faktor doktrinal. Pesimisme ini dapat dihilangkan dengan melakukan *rethinking* ajaran Islam.
2. Semipessimisme tentang upaya demokratisasi di Indonesia berpandangan bahwa demokratisasi di Indonesia akan terhambat karena dekatnya eksekutif dengan militer yang menyebabkan menjauhnya kalangan LSM. Pandangan ini dapat diperkecil dengan menciptakan relasi harmonis antara eksekutif, militer dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Di kalangan politisi populer ungkapkan bahwa dalam politik tak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi, yaitu meraih kekuasaan. Dengan perspektif silaturahmi, ungkapan ini mestinya ditinggalkan. Atau, walaupun ini tetap dipakai, yang menjadi kepentingan abadi bukan meraih kekuasaan melainkan kesejahteraan dan kedamaian rakyat, sesuai dengan tujuan hakiki politik itu sendiri.
4. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang partisipatif dalam berbagai aspek pembangunan termasuk dalam hal bernegara, perlu dimulai dari adanya kelapangan dada semua pihak terutama para eksekutif, legislatif dan juga para tokoh masyarakat untuk saling memberi kesempatan, saling mendengar, dan “duduk bersama-sama” memahami kebutuhan dan keinginan bersama menuju kesejahteraan dalam keadilan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an Al-Karim

Dachlan, MD., dkk., 1987, *Hadits Qudsi: Firman Allah yang tidak Tercantum dalam Al-Qur`an*, Bandung, Diponegoro,

Daud Ali, 1998/1999, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Departemen Agama RI., Jakarta,

HU. *Pikiran Rakyat*, Bandung 6 Juli 2001

HU. *Kompas*, Jakarta, 19 Juli 2001

HU. *Kompas*, Jakarta, 28 Juli 2001

HU. *Kompas*, Jakarta, 6 Agustus 2001

HU. *Kompas*, Jakarta, 13 Juli 2001

HU. *Kompas*, 20 Desember 2000

HU. *Kompas*, Jakarta, 27 Juni 2001

HU. *Koran Tempo*, Jakarta, 30 Juni 2000

HU. *Republika*, 5 Februari 2000

HU. *Republika*, Jakarta, 29 Januari 2001

HU. *Republika*, Jakarta, 10 Maret 2001

Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, 1992 “*Ulumul Qur`an*,” Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta,

Madjid, Nurcholish, 1993, *Islam: Doktrin dan Perbedaan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta,.

Majalah Berita Mingguan *Tempo*, Jakarta, Edisi 23-30 September 2001

Rahardjo, M. Dawam, 1992, *Ensiklopedi Al-Qur`an*, Jakarta, Paramadina.

Rakhmat Jalaluddin, 1988, *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus*, Bandung, Mizan.

Rakhmat Jalaluddin, 1992, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Rosda Karya,

Rakhmat Jalaluddin, 1998, *Reformasi Sufistik*, Bandung, Pustaka Hidayah.

- Rais, M. Amien, 1992, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Mizan Bandung.
- Pamudji, S., 1985, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Bina Aksara, .
- Prayitno, Budi, 1999, *Apakah Demokrasi Itu*, United Stated States Information Agency, tanpa tempat.
- Tirtosudiro, Achmad, *Disiplin dan Silaturahmi dalam Meningkatkan Suber Daya Muslim*, Kumpulan Khutbah, Bandung, Pusat Penerbitan Universitas, LPPM-Unisba.
- Yuliani, Liputo (Koordinator Tim Penulis), 1995, *Kamus Filsafat*, Bandung, Rosda Karya.